

KEDUDUKAN PENCATATAN IKRAR TALAK DALAM PERCERAIAN

(Studi Komparatif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam)

SKRIPSI

Oleh:

Amaliyah

20161700242006



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM

MOJOKERTO

2020

KEDUDUKAN PENCATATAN IKRAR TALAK DALAM PERCERAIAN

(Studi Komparatif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam)

Skripsi

Diajukan kepada:

Fakultas Syariah Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

Program Sarjana Hukum Keluarga Islam



Oleh:

Amaliyah

20161700242006

Pembimbing: Muslihun Lc.,M.Fil.I

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM

MOJOKERTO

2020

ABSTRAK

Amaliyah. 2020. Kedudukan Pencatatan Ikrar Talak Dalam Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Pesantren KH Abdul Chalim.

Pembimbing: Muslihun, Lc., M.Fil.I

Kata Kunci: Pencatatan, Ikrar Talak, Imam Syafi'i, KHI.

Talak adalah perpisahan atau pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri yang terjadi akibat diucapkannya (ikrar) kata talak atau sejenisnya yang memiliki maksud serupa oleh suami kepada istrinya. Imam Syafi'i berpandangan bahwa adanya saksi (pencatatan) dalam talak ditegaskan tidak wajib. Sebab talak adalah sebuah hak yang dikaruniakan Allah kepada seorang suami yang untuk melaksanakan haknya bisa ia gunakan kapanpun dan di manapun tanpa harus menghadirkan bukti (saksi) dan dilakukan di Pengadilan. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pelaksanaan ikrar talak mengharuskan (mewajibkan) adanya saksi dan dilakukan di depan sidang pengadilan. Sehingga perbedaan pandangan hukum tersebut menimbulkan kebingungan dan banyak pertanyaan dimasyarakat terutama bagi orang-orang yang panatik terhadap salah satu mazhab fiqh klasik yang sudah puluhan tahun mempelajari, menekuni dan berpegang teguh kepada ajaran hukumnya. Mengenai apa yang mendasari perbedaan ketentuan hukum tersebut, mengapa ikrar talak hanya dapat dilakukan di depan hakim dalam persidangan dan atas persetujuan hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ketentuan ikrar talak menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam terutama mengenai kedudukan pencatatan ikrar talaknya. Dengan rumusan masalah bagaimana kedudukan pencatatan ikrar talak menurut hukum Islam dan KHI, serta pengkomparasian diantara keduanya.

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif (perbandingan) dengan teknik mengumpulkan data melalui *library research* (pustaka) maupun dokumentasi serta menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berdasar pada ketentuan yang bersumber dari kitab-kitab ushul fiqh dan perundang-undangan (KHI) terkait masalah ketentuan ikrar talak.

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa secara khusus, Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pencatatan ikrar talak memiliki peran dan kedudukan yang sama pentingnya dengan hal pencatatan pernikahan (sederajat). Hal tersebut bertujuan untuk *kemaslahatan* dan menghindari adanya dampak buruk (*kemudharatan*) yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi salah satu pihak dari *kezhaliman* pihak lain yang merupakan bukti autentik telah terjadinya perceraian berupa akta cerai.

ABSTRACT

Amaliyah. 2020. Status of Recording Position of the Pledge of Divorce in Divorce (Comparative Study of Islamic Law and Compilation of Islamic Law)". Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, KH Abdul Chalim Islamic Boarding School.

Supervisor: Muslihun., Lc., M.Fil.I

Keywords: Recording, Pledge of Divorce, Imam Syafi'i, KHI.

Talak is divorce, separation or renunciation of the marriage bond between husband and wife which occurs as a result of pronouncing (pledge) the word talak or the like which has a similar intention by the husband to his wife. Imam Syafi'i is of the view that the presence of witnesses (recording) in talak is confirmed as not obligatory. Because talak is a right that is given by God to a husband who can exercise his rights anytime and anywhere without having to present evidence (witnesses) and be carried out in court. Meanwhile, the Islamic Law Compilation stipulates that the implementation of the talak vow requires witnesses and is carried out in front of a court hearing. So that the difference in legal views raises doubts and many questions in society, especially for people who are panicky about one of the classical fiqh schools that have studied, persevered and firmly understood their legal teaching for decades. Regarding what underlies these differences in legal provisions, why the pledge of divorce can only be made before a judge in a trial and with the judge's approval.

This study aims to compare the provisions of divorce pledge according to the Mazhab Syafi'i and Compilation of Islamic Law especially regarding the position of recording of divorce pledge. Recording of divorce pledge according to Islamic law and KHI, as well as comparison between the two.

This research is descriptive-comparative (comparison) with the techniques of collecting data through library research (literature or libraries) and documentation and using a normative juridical approach based on the provisions sourced from the Ushul Fiqh books and legislation (KHI) related to the issue of divorce pledge provisions.

The results of the study and discussion concluded that in particular, the Compilation of Islamic Law regulates that the recording of divorce pledges has the same role and position as the matter of marriage registration (equivalent). It aims to benefit and avoid any adverse effects intended to provide legal certainty and protect one party from the tyranny of the other party which is authentic evidence of divorce in the form of divorce certificate.